***Evaluasi Pengendalian Internal atas Pemberian Kredit Pada Unit Kredit Agunan KPRI "RAUNG" Besuki Situbondo***

# *"THE EVALUATION INTERNAL CONTROL OF GIVING CREDIT TO UNIT CREDIT AGUNAN KPRI "RAUNG" BESUKI SITUBONDO"*

*Raudatul Laily Qamariyah*
*1410421008*
*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ)*
*Jl. Karimata No. 49, Jember 68121*
*Artikel Ilmiah Mahasiswa 2018*

**ABSTRAK**

**ABSTRAK**

Pengendalian Internal merupakan hal yang penting bagi kegiatan organisasi dalam menjalankan programnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pengendalian internal pada Unit Kredit Agunan KPRI "RAUNG" dengan unsur-unsur Pengendalian Internal yang terdiri dari lima komponen yakni Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh adalah dari sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini di simpulkan bahwa Pengendalian Internal Pemberian Kredit masih belum memadai dan efektif, dimana pada penaksiran resiko dalam pencairan dana kredit yang terlalu cepat mengakibatkan kurang efektifnya proses seleksi yang nantinya akan merugikan perusahaan dari penarikan pengembalian kredit, serta pemantauan terhadap penagihan tidak dilakukan secara berkala dan konsisten terhadap nasabah. Sehingga, perlu adanya evaluasi dan perbaikan kembali terkait Pengendalian Internal atas pemberian kredit.

**Kata Kunci:** Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.

**ABSTRACT**

*Internal Control is important for the organization's activities in running the program to achieve the goals that have been set or planned previously. The purpose of this study is to evaluate the internal control of the KPRI Collateral Credit Unit "RAUNG" with the elements of Internal Control consisting*

*of five components: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring.*

*This study used descriptive qualitative method. Data obtained in this study based on interviews and documentation. Source of data obtained is from source of primary and secondary data. The results of this study concluded that the Internal Control of Credit Disbursement is still inadequate and effective, where the risk assessment in the disbursement of credit funds that are too fast resulting in less effective selection process that will harm the company from withdrawal of credit returns, and monitoring of billing is not done periodically and consistent with customers. Therefore, there needs to be an evaluation and correction related to the Internal Control of credit granting.*

**Keywords:** *Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring*

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini, menunjang banyaknya perkembangan dan kemajuan perekonomian di dunia terutama di Indonesia. Semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia ini juga berdampak pada banyaknya industri-industri atau dunia usaha baru yang berkembang, baik industri atau unit usaha kecil, menengah maupun ke atas. Salah satu perkembangan dunia bisnis yang mengalami perkembangan pesat adalah unit usaha di bidang perkreditan. Unit usaha perkreditan merupakan salah satu dunia usaha di bidang pelayanan perkreditan yang banyak dan berkembang di Indonesia, yang tujuannya untuk memberikan dana pinjaman berupa kredit kepada masyarakat.

Semakin Pesatnya perkembangan bisnis di dunia perkreditan tersebut semakin berkembang, mengingat kebutuhan masyarakat akan jasa perkreditan guna usaha ataupun memenuhi taraf hidup masyarakat setempat. Salah satu badan usaha yang memberikan dana pinjaman berupa kredit yaitu koperasi. Koperasi menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan.

Koperasi didalam menjalankan operasionalnya dibutuhkan pengendalian internal yang baik, mengingat suatu unit usaha yang baik memiliki sebuah sistem informasi yang baik dengan didukung pengendalian internal yang memadai. Pengendalian Internal adalah sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. (Romney, 2015: 226)

Pengendalian internal atas pemberian kredit pada koperasi sangat dibutuhkan, mengingat dalam pemberian kredit yang diberikan kepada masyarakat dibutuhkan sebuah pengendalian internal guna mencapai tujuan perusahaan serta mengurangi kecurangan yang terjadi. Oleh sebab itu, dalam suatu unit organisasi seperti halnya

koperasi, hendaknya dibutuhkan suatu pengendalian yang baik guna mendukung kegiatan operasional perusahaan di masa yang akan datang serta melindungi aset berharga koperasi tersebut.

Salah satu unit usaha koperasi di Indonesia adalah KPRI Raung yang terletak di kabupaten Situbondo Jawa Timur. Unit Kredit Agunan KPRI Raung merupakan unit Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang berkecimpung di dunia bisnis pinjaman dana pada masyarakat dengan jaminan yang disertakan, misalnya BPKB motor atau mobil dengan balas jasa yang ringan. Pemberian pinjaman yang ringan pada Unit Kredit Agunan KPRI raung ini membuat masyarakat sekitar mempercayakan pelayanan pinjaman pada Unit Kredit Agunan KPRI raung tersebut, sehingga Unit Kredit Agunan KPRI Raung membutuhkan sebuah Sistem Informasi Akuntansi yang baik serta didukung dengan Pengendalian Internal (PI) yang memadai guna mencapai kemajuan organisasi serta meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.

Pada saat survei pertama peneliti melakukan wawancara dengan narasumber pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo, peneliti menemui sebuah permasalahan yang terjadi terhadap pemberian kredit pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo. Permasalahan yang terjadi yaitu sering terjadinya keterlambatan pada pembayaran kredit atau biasa disebut dengan kredit macet. Permasalahan yang terjadi ini bisa berdampak pada kinerja keuangan pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo itu sendiri, dikarenakan saldo piutang yang semakin banyak yang belum tertagih dari nasabah. Seperti penjelasan permasalahan di atas, bahwasannya unsur pokok pengendalian internal yang baik yaitu struktur organisasi yang memisahkan fungsi dan tanggungjawab fungsionalnya yang tegas, fungsi otorisasi, prosedur pencatatan, praktek yang sehat, serta kinerja mutu karyawan yang baik.

Pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo proses pencairan dana kredit yang cepat mengakibatkan proses seleksi tidak maksimal, hal ini juga disebabkan permintaan kredit yang semakin meningkat. Sehingga, dana kredit dapat dicairkan selang waktu sekitar 30 menit dan dapat ditunggu oleh nasabah. selain itu proses persetujuan yang terlalu cepat dan mudah, membuat banyaknya nasabah yang mengajukan dana pinjaman yang berakibat pada banyaknya piutang tak tertagih atau kredit macet pada saat penagihan, serta fungsi pengawasan terhadap penagihan tidak dilakukan secara berkala dan konsisten. Hal ini menunjukkan Pengendalian Internal dilaksanakan secara tidak efektif sehingga berdampak pada peningkatan kredit macet dari tahun ke tahun.

pada tahun 2014 kredit macet pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 119.394.000, pada tahun 2015 mengalami kenaikan kredit macet mencapai 10% sebesar Rp.132.660.000 dari tahun 2014, pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan kredit macet mencapai 20% sebesar Rp. 165.825.000, dan pada tahun 2017 tingkat kredit macet pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan mencapai 35% dari tahun 2016 sebesar Rp. 250.500.000. Diagram di atas menjelaskan bahwasannya peningkatan kredit macet pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan yang pesat di tahun 2017, hal ini menyebabkan kinerja keuangan pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo mengalami penurunan karena adanya piutang yang belum tertagih beberapa tahun terakhir. Sehingga, permasalahan seperti ini mengakibatkan penurunan pendapatan dari dana pinjaman kredit pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten situbondo, seperti nampak pada gambar 1.1. Sehingga perlu diadakan evaluasi kembali terhadap pengendalian internal atas pemberian kredit pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo untuk meminimalisir adanya permasalahan kredit macet.

Berdasarkan uraian dan fenomena permasalahan di atas yang terjadi pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini dengan memilih judul yaitu sebagai berikut:

**"Evaluasi Pengendalian Internal atas Pemberian Kredit pada Unit Kredit Agunan KPRI "Raung" Besuki Situbondo.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat di ambil rumusan masalah penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pengendalian Internal (PI) dan Prosedur Pemberian Kredit pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo?
2. Apakah Pengendalian Internal (PI) Pemberian Kredit pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo sudah memadai?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini dibuat yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pengendalian Internal (PI) atas Pemberian Kredit dan Prosedur Pemberian Kredit pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo.

2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi, apakah Pengendalian Internal (PI) atas Pemberian kredit pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo sudah memadai.

**1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam rangka upaya mengevaluasi pengendalian internal pada pemberian kredit, peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

a. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini mampu membantu memberikan gambaran mengenai pengendalian Internal terhadap perusahaan, terutama dalam menunjang dan mendukung perkreditan agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Hasil akhir penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam rangka terus mempertahankan atau selalu melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikandalam Pengendalian internal atas Pemberian Kredit pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo.

2. Bagi Penulis.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan wawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal atas pemberian kredit serta mengetahui prosedur dalam pemberian kredit beserta formulir dan dokumen yang digunakan.

3. Bagi Universitas.

a. Sebagai referensi tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa.

b. Sebagai pengenalan dalam instansi dalam peningkatan kreatifitas pribadi.

c. Memperkuat dan mempererat hubungan antara Universitas dengan Instansi yang terkait.

4. Bagi Pihak Lain.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan tambahan pengetahuan, terutama dalam prosedur pemberian kredit yang di lakukan pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pengendalian Internal

Pengendalian Internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan Efisien

#### 2.1.2 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) sebagaimana tercantum dalam standar profesional akuntan publik adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk

memperoleh keyakinan yang memadai mengandung arti bahwa struktur pengendalian internal suatu usaha tidak melebihi manfaat yang diharapkan.

**2.1.3 Tujuan Pengendalian Internal**

Pengendalian Internal merupakan manajemen untuk menangka risiko yang diketahui, untuk mencapai suatu tujuan pengendalian (Control Objective). Pengendalian Internal yang baik yaitu bagaimana didalam organisasi atu perushaan tersebut bebas dari tindak hal yang merugikan perusahaan atau dari segala penyelewengan yang dilakukan, untuk itu berikut ada beberapa tujuan dari Pengendalian Internal.

Menurut Theodarus (2013: 127) tujuan pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

1. Strategis, sasaran-sasaran utama yang mendukung misi entitas.
2. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
3. Pengendalian Operasional.
4. Kepatuhan terhdap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

**2.1.4 Unsur-Unsur Pengendalian Internal**

Pengendalian Internal Terdiri dari beberapa unsur-unsur, unsur tersebut dalam pengendalian internal saling berhubungan mengingat pengendalian internal sangat penting bagi perusahaan. Menurut Boynton (2003) yang meliputi unsur pokok pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) menetapkan suatu organisasi, yang mempengaruhi kesadaran akan pengenalian orang-orangnya.
2. Penilaian Resiko (*Risk Asseement*) merupakan pengindetifikasian dan analisis entitas mengenai resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang membentuk suatu dasar mengenai bagaimana resiko harus dikelola.
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Aktivities*) adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberikanarah bagi manajemen seperti proses ketaatan pada tentang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Aktivitas pengendalian merupakan bagian yang menyatu atau integral dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengkajian.
4. Informasi dan Komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan merupakan proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal.

**2.1.5 Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)**

Efektifitas pengendalian internal dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan pengendalian internal. Lingkungan pengendalian internal mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manejer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal perusahaan, Lingkungan pengendalian berurusan dengan fungsi pengelolaan (management) dan pengawasan (governance) ditingkat tertinggi dalam entitas itu (Theodarus, 2013: 130).

**2.1.6 Karakteristik Pengendalian Internal**

Adapun karakteristik pengendalian internal yang dikemukakan oleh Boynton (2003), yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pemisahan wewenang petugas atau pejabat untuk mengotorisasi setiap jenis transaksi dan penetapan karyawan yang bertugas untuk memeriksa setiap transaksi apakah transaksi tersebut telah ditandatangani oleh fungsi yang berkaitan dengan fungsi tersebut.
2. Penyelenggaraan pembukuan atau catatan akuntansi yang akurat yang disajikan dibuat sedemikian rupa oleh karyawan yang bersangkutan dapat diperiksa sesuai dengan catatan lain yang dibuat oleh petugas lain yang memiliki hak independen.
3. Adanya pemeriksaaan secara periodik terhadap catatan persediaan aktiva.
4. Adanya pengawasan terhadap persediaan aktiva yang diperjual belikan, sebab hal ini menyangkut kekayaan perusahaan.
5. Penempatan pegawai sesuai dengan tingkat kecakapan dan tingkat kemampuannya serta sesuai dengan tanggungjawabnya.
6. Adanya pemisahan fungsi penyimpan aktiva, fungsi pencatatan dan fungsi pelaksanaan transaksi yang bersangkutan.

**2.1.7 Komponen Pengendalian Internal**

Berdasarkan *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO), pengendalian internal adalah proses karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. COSO menyajikan langkah yang signifikan atas definisi pengendalian internal yang dahulu terbatas pada pengendalian akuntansi, menjadi pengendalian yang menangani tujuan yang luas dari para dewan komisaris, untuk itu berdasarkan COSO terdapat 5 komponen dalam pengendalian Internal yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Inti dari bisnis apa pun adalah orang-orangnya, ciri perorangan termasuk integritas, nilai-nilai etika dan kompetensi serta lingkungan tempat beroperasi, mereka adalah mesin yang mengemudiakan organisasi dan dasar tempat segala hal terletak.

2. Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manejemen untuk mengatasi resiko pencapaian tujuan organisasi organisasi, secara efektif dijalankan.

3. Penilaian Resiko

Organisasi harus menempatkan tujuan, yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya. Agar organisasi beroperasi secara harmonis.

4. Informasi dan Komunikasi

Di sekitar aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi. Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapatkan informasi dan bertukar informasi sesuai dengan kebutuhan.

5. Pengawasan

Seluruh proses harus diawasi, dan perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

**2.1.8 Keterbatasan Pengendalian Internal**

Keterbatasan Pengendalian Internal adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pertimbangan
2. Kemacetan
3. Kolusi
4. Penolakan manajemen
5. Biaya versus manfaat

**2.2 Pengendalian Internal Kredit**

**2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal Kredit**

Pengendalian internal kredit adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manejemen, dan personel lain, dalam usahanya untuk menjaga kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang efektif dan efisien, menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan perkreditan yang ditetapkan serta penyusunan laporan keuangan handal.

Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunga nya atau dapat di berikan kepada nasabah dengan cepat tanpa terkendala dengan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan pengendalian yang baik dan benar. Tujuan pengendalian kredit antara lain sebagai berikut:

a. Menjaga agar kredit disalurkan tetap aman
b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan tetap lancar.

c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau mesih perlu dilakukan kesempurnaan.
e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
f. Mengetahui presentase *collectibility credit* yang disalurkan.
g. Meningkatkan moral dan tanggungjawab karyawan analisis kredit.

**2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal Kredit**

Tujuan pengendalian internal kredit menurut hasibuan (2004) dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kredit yang disalurkan agar tetap aman.
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
3. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
4. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
5. Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan.

**2.3 Kredit**

**2.3.1 Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu credere, yang berarti kepercayaan atau credo yaitu percaya. Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Bagi debitur, kredit yang diterima merupakan kepercayaan yang berarti menerima amanah sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktunya.

Pengertian kredit menurut suyatno (2003) adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang. Menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya seelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

**2.3.2 Unsur-Unsur Kredit**

Menurut Suyatno (2003) unsur kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Adalah sesuatu yang paling utama karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur maka akan sangat sulit terwujud.

2. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.

3. Waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Prestasi

prestasi disini adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur.

**2.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Menurut suyatno (2003) tujuan kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan
   Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima.
2. Membantu usaha nasabah
   Untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.
3. Membantu pemerintah
   Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank maka akan semakin baik

**2.3.4 Jenis Kredit**

menurut Kasmir (2012), yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan.
   a. Kredit Investasi.
      Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya, untuk membangun pabrik atau membeli mesin.
   b. Kredit Modal Kerja.
      Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan peningkatan produksi dalam operasionalnya, sebagai contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

**2.3.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Menurut Kasmir (2012) prinsip penilaian dalam pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P yaitu:

1. Character
   Sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit harus benar dipercaya.
2. Capacity
   Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit.
3. Capital
   Yaitu untuk melihat modal efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan.

4. Condition
   Dalam pemberian kredit hendaknya dilakukan juga penilaian kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang.
5. Collateral
   Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa fisik dan non fisik.

Sedangkan Penilaian kredit berdasarkan 7P Menurut Kasmir (2012) dapat dibagi dan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Personality
   Yaitu menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari dimasa lalu.
2. Party
   Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertertu atau golongan-golongan tertentu.
3. Purpose
   Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit.
4. Propect
   Untuk menilai usaha nasabah dimasa mendatang menguntungkan atau tidak.
5. Payment
   Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil.
6. Profitability
   Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. Protection
   Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit diberikan mendapat jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

**2.3.6 Prosedur Pemberian Kredit**

Menurut Kasmir (2012) Prosedur Pemberian Kredit yaitu sebagai berikut:

1. Tahap permohonan Kredit.
2. Tahap Penyidikan Analisa Kredit.
3. Tahap Keputusan atas Pemberian Kredit.
4. Tahap Penolakan Permohonan Kredit.
5. Tahap Persetujuan permohonan Kredit.
6. Tahap pencairan Kredit.
7. Tahap Pengawasan Kredit.
8. Tahap pelunasan Kredit.

**2.4 Koperasi**

**2.4.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada karyawan dalam semangat seorang buat semua dan semua buat seorang. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Bernhard, 2012).

### 2.4.2 Tujuan koperasi

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan menurut Sitio dan Tamba berpendapat bahwa, dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### 2.4.3 Jenis Koperasi

Secara garis besar koperasi yang ada dibagi menjadi 5 yaitu sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumsi.

   Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga layak.

2. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam).

   Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan (Ninik Widiyanti, 2010: 54). Tujuan koperasi kredit adalah sebagai berikut:

   a. Membantu keperluan kredit kepada para anggotanya dengan syarat-syarat yang ringan
   b. Membidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentu modal sendiri.
   c. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

3. Koperasi Jasa.

   Koperasi jasa adalah koperasi yang aktifitasnya bergerak di bidang penyediaan tertentu bagi para anggotanya mapun masyarakat umum (Ninik Widiyanti, 2010: 55). Contohnya koperasi angkutan, koperasi jasa audit, koperasi perencanaan, dan konstruksi bangunan.

4. Koperasi Produksi.

   Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi maupun anggota-

anggota koperasi (Ninik Widiyanti, 2010: 55).

5. Koperasi Serba Usaha.
   Merupakan koperasi yang jenis usahanya memiliki kegiatan lebih dari satu macam misalnya koperasi yang melakukan kegiatan produksi dan konsumen (Ninik Widiyanti, 2010: 56).

**2.4.4 Aspek Permodalan Koperasi**

Sumber permodalan koperasi menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa modal koperasi itu sendiri berasal dari modal sendiri dan pinjaman, sedangkan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1976 ditentukan bahwa modal koperasi itu sendiri dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lainnya. Seperti simpanan pokok, wajib, dan sukarela seperti berikut:

1. Simpanan Pokok.
   Adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota.
2. Simpanan Wajib.
   Adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarkan kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu.
3. Simpanan Sukarela
   Diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. Simpanan sukarela tersebut bisa saja diadakan misalnya dalam rangka hari raya/Lebaran atau bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dimana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa.

**2.4.4 Fungsi dan Peran Koperasi**

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 pasal 4 bahwa fungsi dan peran koperasi yaitu sebagai berikut:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umunnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertiggi kualitas manusia dan masyarakat.
c. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya.
d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

**2.5 Kerangka Pemecahan Masalah**

Kerangka Pemecahan Masalah

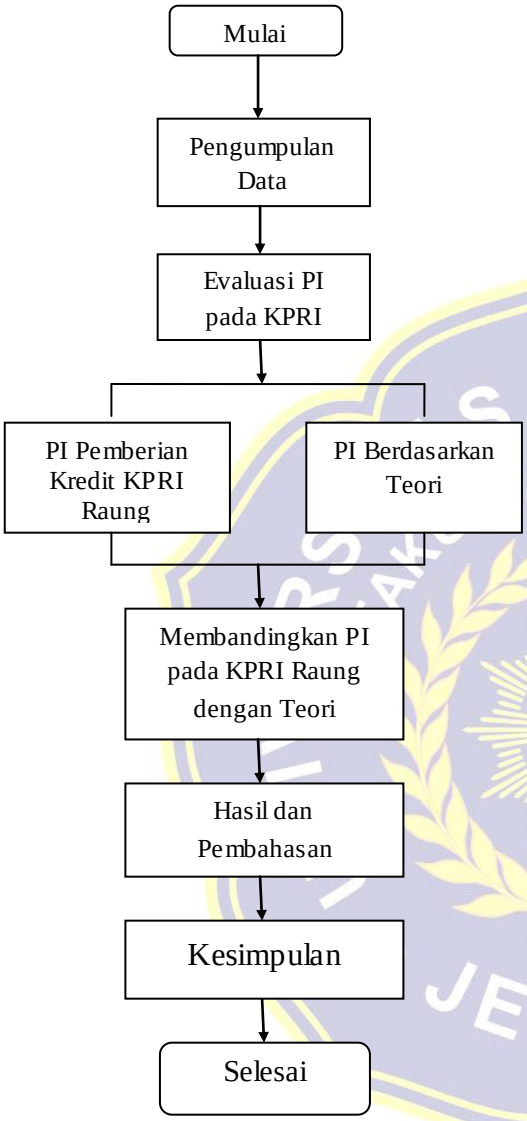


**BAB 3. METODE PENELITIAN**

**3.1 Lokasi Objek Penelitian**

Objek penelitian ini dilakukan pada koperasi yang bergerak dibidang pemberian pinjaman dana kredit, yaitu Unit Kredit KPRI Agunan Raung yang beralamatkan di Jl. Raya Surabaya Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo Jawa Timur.

**3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengendalian internal atas pemberian kredit pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis, meneliti, serta mengumpulkan data, kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan penelitian dari literatur yang ada. Menurut Indriantoro dan Supomo (2016: 12) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenali masalah-masalah dalam keadaan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kompleks dan rinci.

**3.3 Jenis-jenis Data**

**3.3.1 Jenis Sumber Data**

1. Data Primer.

   Yaitu jenis data penelitian yang diambil secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara (Nur Indriantoro, 2016: 146). Data primer yang di dapat oleh peneliti misalnya melakukan wawancara kepada salah satu staf pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo mengenai

pengendalian internal pemberian kredit serta prosedur perkreditan.

2. Data Sekunder.

Yaitu jenis data penelitian yang diperoleh oleh peneliti melalui perantara atau dicatat oleh pihak lain (Nur Indriantoro, 2016: 147). Data yang diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen yang terkait dalam pengendalian internal atas pemberian kredit pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo, seperti surat permohonan kredit struktur organisasi dan dokumen terkait lainnya.

**3.4 Metode Pengumpulan Data**

Langkah-Langkah Analisis Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Penerapan Pengendalian Internal sebagai Berikut:

a. Mengidentifikasi Permasalahan.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi atas pengendalian internal pemberian kredit pada unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo yaitu menyangkut ketidaktepatan waktu dalam pembayaran kredit dari nasabah serta terjadinya piutang tak tertagih pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo.

b. Mengumpulkan Data.

Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan di susun sesuai dengan pertanyaan yang di ajukan kepada responden, kemudian melakukan analisis data dengan memulai menyusun bagan alir *(Flowchat)* prosedur pemberian kredit serta melakukan analisis terhadap pengendalian internal atas pemberian kredit pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo berdasarkan informasi yang di dapat.

c. Mengungkapkan dan menggambarkan pelaksanaan pengendalian internal atas pemberian kredit pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo.

2. Mengevaluasi Pengendalian Internal yang memadai sebagai berikut:

Membandingkan unsur-unsur pengendalian internal yang di terapkan di Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo dengan unsur-unsur pengendalian internal menurut teori yang meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian
b. Penaksiran Risiko
c. Aktivitas Pengendalian
d. Informasi dan Komunikasi
e. Pemantauan

3. Penyusunan Kesimpulan.

Setelah evaluasi atas unsur-unsur pengendalian internal kemudian diberikan kesimpulan terhadap Pengendalian Internal atas Pemberian Kredit pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Kabupaten Situbondo apakah sudah memadai atau tidak.

# BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Umum Objek

### 4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

KPRI Raung Situbondo merupakan suatu unit usaha koperasi yang terletak di kabupaten/kota Situbondo provinsi Jawa Timur. KPRI guru-guru Raung Situbondo didirikan pada taggal 1 oktober 1954 oleh bapak Notowardoyo, Bapak R. Soekiman dan Bapak Brotokusumo yang ketiganya telah almarhum. KPRI Raung Situbondo didirikan dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan para guru di wilayah pembantu kabupaten/kota Situbondo. Nama singkatan KPRI Raung itu sendiri di ambil dari kepanjangan "Rukun Agawe Utamaning Ngurip", yang merupakan tujuan berdirinya koperasi ini yaitu mensejahterakan anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Awal berdirinya KPRI Raung ini terletak di kantor pusat yang beralamatkan di JL. Talkandang No. 1A Situbondo kota, seiring dengan kemajuan teknologi serta kemakmuran dari koperasi Raung itu sendiri, koperasi Raung Situbondo membuka beberapa cabang unit di kabupaten Situbondo. Salah satu cabang unit KPRI Raung yaitu Unit Kredit Agunan yang terletak di Jl. Raya Surabaya Besuki Kabupaten Situbondo.

Koperasi Raung Situbondo ini usaha utamanya adalah memberikan pelayanan berupa dana simpan pinjam atau biasa disebut kredit kepada masyarakat dengan jaminan berupa BPKB kendaraan.

### 4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

   Terwujudnya kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam suasana kehidupan berkoperasi yang sehat dan dijiwai semangat jati diri koperasi menuju tatanan perekonomian bangsa yang maju, adil, dan makmur.

2. Misi

   a) Mewujudkan pelayanan prima kepada anggota/masyarakat melalui kegiatan usaha yang dilakukan secara profesional.
   b) Mewujudkan partisipasi aktif anggota/masyarakat terhadap kegiatan koperasi yang dijiwai semangat persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan solidaritas menuju koperasi yang maju dan mandiri.
   c) Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) koperasi andal, dan mengamankan jati diri koperasi, berdedikasi, bermoral dan profesional.
   d) Melakukan kerja sama yang saling menguntungkan antar lembaga ekonomi dalam rangka mewujudkan usaha koperasi.

### 4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu bagan struktur pembagian tugas dan wewenang dalam suatu perusahaan. tujuan adanya struktur organisasi ini adalah untuk

mengetahui secara mudah pembagian tugas dan wewenang pada perusahaan dalam bentuk bagan struktur. Struktur organisasi dalam unit kredit agunan KPRI Raung itu sendiri memiliki struktur bagan organisasi.

### 4.1.4 Pembagian Tugas dan wewenang

Pembagian tugas dan wewenang dibuat dengan tujuan adanya struktur pembagian tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi perusahaan. Pembagian tugas dan wewenang pada Unit Kredit Agunan Situbondo yaitu sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Pimpinan bertugas memimpin semua karyawan Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Situbondo, sekaligus mengawasi kinerja karyawan dan mengatasi serta mencari solusi permasalahan jika terjadi pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Situbondo.

2. Verifikator

Bertugas memberikan verifikasi atau bagian tafsir terhadap pemberian dana pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Situbondo.

3. Operator

Operator Bertugas dalam menginput data pada komputer setelah dilakukan tafsir oleh Verivikator Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Situbondo.

4. Validator Fisik

Bertugas memvalidasi atau menyetujui semua persyaratan serta mengecek ulang syarat dan data yang telah lengkap dan disiapkan dalam upaya pemberian pinjaman dana kredit pada nasabah.

5. Kasir

Bertugas memberikan dana kepada nasabah dan melayani nasabah dalam pemberian kredit pada Unit Kredit Raung Besuki Situbondo.

6. Karyawan

Karyawan lainnya dalam unit Agunan Raung yaitu mereka yang bertugas menarik dana pinjaman pada nasabah yang melakukan pinjaman dana pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki Situbondo.

## 4.2 Analisis dan Pembahasan

### 4.2.1 Identifikasi permasalahan pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki

Berdasarkan hasil dari identifikasi masalah yang dilakukan oleh peneliti pada saat awal survei, ditemui sebuah permasalahan pada Unit Kredit Agunan KPRI Raung Besuki. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan diatas, bahwasannya dalam pemberian kredit pada Unit Kredit KPRI Raung mengalami permasalahan pada saat pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah.

Pada KPRI Raung besuki diketahui berdasarkan analisis peneliti dan data yang diperoleh pada objek penelitian, kredit bermasalah terjadi mulai tahun 2015 yaitu

sebesar Rp.132.660.000. Pada pada tahun 2017 peningkatan pembayaran dana kredit macet mengalami peningkatan menjadi Rp. 250.500.000 dari tahun sebelumnya. Sehingga rata-rata peningkatan kredit macet sampai tahun 2017 tersebut mencapai 35% selama 3 tahun. Berdasarkan kenaikan kredit macet pada KPRI Raung Besuki tersebut, menandakan masih kurang efektifnya Pengendalian Internal yang dilakukan oleh perusahaan.

**4.2.2 Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki**

1. faktor pertama yang menyebabkan permasalahan kredit macet adalah pada saat evaluasi yang dilakukan pada KPRI Raung terlalu cepat. Pencairan dana yang terlalu cepat tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya tim verivikator untuk melakukan evaluasi terhadap nasabah yang akan mengajukan dana pinjaman kredit. Faktor seperti ini harus dipertimbangkan kembali oleh pihak penanggung jawab dari Unit KPRI Raung

2. Faktor Kedua yang menyebabkan adanya permasalahan kredit macet yaitu pada saat dana yang dicairkan terlalu cepat yang akan berdampak pada kenaikan permintaan kredit. Kenaikan pinjaman dari nasabah ini mungkin dapat membuat kinerja finansial perusahaan semakin baik dari segi pemasukan, akan tetapi jika proses evaluasi terlalu cepat tanpa memperhatikan keadaan lingkungan nasabah yang akan meminjamkan dana kreditnya akan sebaliknya berdampak pada penurunan kinerja keuangan perusahaan, yang ditandai dengan banyaknya piutang yang belum dibayarkan.

**4.2.3 Syarat pengajuan dana pinjaman**

Syarat pengajuan dana pinjaman pada unit kredit KPRI Raung berdasarkan analisis peneliti dengan melakukan hasil wawancara pada objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. BPKB asli sebagai jaminan
2. STNK asli sebagai jaminan
3. KTP asli (Domisili di kabupaten Situbondo)
4. Membawa unit kendaraan sesuai BPKB yang dijaminkan
5. Produksi kendaraan minimal tahun 2005
6. Diutamakan plat nomor kendaraan “P” (Situbondo, Banyuwangi, Jember)

**4.2.4 Fungsi-fungsi yang Terkait atas pemberian Kredit pada Unit KPRI Raung Besuki**

1. Fungsi Verifikator

Fungsi verifikator yaitu bertugas untuk memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan dana pinjaman kredit pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki.

2.Fungsi Operator

Fungsi operator yaitu bertugas dalam menginput data yang telah di verifikasi oleh

verifikator, fungsi operator dilakukan oleh 1 orang.

3.Fungsi Validator

Fungsi validator bertugas menyetujui atau memvalidasi persyaratan berkas atau pengajuan dana pinjaman pada Unit Kredit KPRI Raung.

4.Fungsi Kasir

Fungsi kasir dalam melakukan tugasnya adalah melakukan pembayaran atas dana pinjaman yang akan diberikan pada nasabah yang telah di validasi oleh validator. Kasir pada unit kredit KPRI Raung terdiri dari 2 orang, pemberian jabatan kasir 2 orang ini bertujuan untuk menanggulangani banyaknya nasabah yang mengajukan dana pinjaman pada Unit Kredit KPRI Raung.

**4.2.5 Jaringan prosedur Pemberian Kredit Pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki.**

1. Nasabah
   a.Mulai.
   b.Nasabah dalam mengajukan dana kredit, langkah pertama yaitu datang langsung pada unit kredit KPRI Raung dengan membawa persyaratan yaitu BPKB asli, fotocopi STNK 2 lembar, fotocopi BPKB 2 lembar, dan fotokopi KTP.
   c.Mengisi formulir Surat Permohonan Pinjaman (SPP) sesuai dengan SOP yang ditentukan, kemudian nasabah menyerahkan pada bagian verifikator untuk dicek kelengkapan berkasnya beserta persyaratan yang diminta.
2. Verifikator
   a.Bagian verifikator menerima berkas dari nasabah untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi terhadap kelengkapan berkas.
   b.Bagian verifikator mengirimkan berkas pada bagian validator untuk divalidasi kelengkapan berkas tersebut jika lengkap. Apabila berkas tersebut belum lengkap maka akan dikembalikan pada nasabah untuk dilengkapi kembali.
3. Validator
   a.Validator menerima berkas dari verifikator, selanjutnya validator melakukan validasi serta pertimbangan dana yang akan dipinjamkan pada nasabah.
   b.Validator mengarsip satu lembar fotocopy STNK serta jaminan BPKB asli dari nasabah, kemudian validator memberikan berkas selanjutnya pada operator untuk di input datanya.
4. Operator
   a.Operator menerima data dari validator, kemudian menginput data sesuai dengan berkas yang diterima.

b.Operator menerbitkan Bukti Cek Fisik Kendaraan (BCFK) 1 lembar, Bukti Kas Keluar 3 Lembar yaitu untuk:

a. 1 BKK untuk Validator di arsip beserta cek fisik kendaraan dan BKK, kemudian validator melakukan cek fisik kesesuaian kendaraan.
b. 1 BKK untuk Kasir di arsip
c. 1 BKK untuk nasabah, dan menerbitkan Kartu Pinjaman (KP) untuk diserakan pada kasir.

Sebelum memberikan pada kasir dan validator, operator meminta otorisasi dari pimpinan sebagai persetujuan atas pencairan dana kredit yang akan dibayarkan kepada nasabah.

5. Kasir

a.Kasir menerima berkas dari operator berupa Bukti Kas Keluar (BKK) 2 lembar, Kartu Pinjaman (KP), serta Fotocopi BPKB dari operator.

b.Kasir mengarsip Bukti Kas Keluar (BKK), dan melakukan pembayaran dana pinjaman beserta menyerahkan fotocopy BPKB, Kartu Pinjaman (KP), serta tanda Bukti Kas Keluar (BKK) untuk nasabah.

c.Selesai.

**4.2.6 Dokumen yang digunakan dalam Pemberian Kredit pada Unit Kredit KPRI Raung.**

1.Surat Permohonan pinjaman

Merupakan dokumen yang digunakan Unit Kredit KPRI Raung dalam upaya pendaftaran pengisian Oleh Calon Nasabah untuk mendata serta menginput informasi terkait nasabah.

2.Kartu Pinjaman

Dokumen ini digunakan pada saat perincian pembayaran oleh nasabah yang berisi saldo pinjaman, bunga, serta jumlah pinjaman yang diperoleh.

3.Bukti Kas Keluar

Dibuat dalam upaya melihat kas keluar dari perusahaan yang dibayarkan atau dipinjamkan pada nasabah atas pendanaan kredit.

4.Bukti Kas Masuk

Rincian pembayaran angsuran oleh nasabah pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki.

5.Bukti Cek fisik Kendaraan

Berfungsi sebagai kelayakan atas kendaraan untuk dijadikan sebuah jaminan pinjaman kredit.

**4.2.7 Catatan Akuntansi yang digunakan pada pemberian Kredit Unit KPRI Raung besuki**

1.Jurnal Umum

Digunakan untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan dan dilakukan

oleh bagian pembukuan dari Unit Kredit KPRI Raung Besuki.

2.Buku Besar

Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang telah dicatat dan dimasukkan ke dalam jurnal umum, selanjutnya untuk dipilah dan kemudian dijadikan sebagai laporan keuangan.

3.Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi pelaporan atas bukti keseluruhan aktivitas pengeluaran dan penerimaan yang diperoleh dari operasional perusahaan, yaitu terdiri dari laporan laba rugi, dan neraca.

**4.3 Evaluasi pengendalian Internal atas Pemberian Kredit Pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki**

Langkah selanjutnya setelah melakukan penjabaran atas profil serta hasil identifikasi permasalahan perusahaan di atas, dalam melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal atas pemberian dana pinjaman kredit pada KPRI Raung adalah melakukan pengumpulan data terkait syarat pengajuan dana pinjaman kredit, menganalisis fungsi pengendalian internal pemberian kredit yang ada pada KPRI Raung, menganalisis prosedur pemberian kredit yang diterapkan pada KPRI Raung Besuki, dokumen terkait, serta catatan akuntansi terkait pemberian kredit pada KPRI Raung Besuki. Setelah melakukan langkah tersebut, peneliti akan mengevaluasi pengendalian internal atas pemberian kredit dengan membandingkan melalui teori unsur-unsur pengendalian internal yang dimulai dari lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan atau pengawasan yang diterapkan pada perusahaan. Langkah akhir atas evaluasi pemberian kredit adalah melakukan penilaian terhadap pengendalian internal atas pemberian kredit pada KPRI Raung Besuki.

**4.3.1 Pengendalian Internal Pada Unit Kredit KPRI Raung besuki**

1. Lingkungan Pengendalian

Dilihat dari lingkungan pengendalian pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki, pelaksanaan lingkungan pengendalian meliputi tanggung jawab masing-masing dari sub devisi kasir, validator, verifikator, dan operator melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang ditunjuk oleh penanggung jawab pimpinan dan diawasi langsung oleh pimpinan unit kredit KPRI Raung.

2. Penaksiran Resiko

Pengendalian internal dari penaksiran resiko yang dilakukan oleh Unit Kredit KPRI Raung Besuki, dilakukan secara cepat dan bersamaan dengan fungsi terkait dan pemisahan tugas yang telah direncanakan oleh perusahaan. penaksiran yang dilakukan meliputi identifikasi, analisis, serta pertimbangan yang dilakukan untuk mempertimbangkan resiko pemberian kredit

yang diberikan kepada nasabah diputuskan dalam waktu 30 menit jika semua syarat dalam pengajuan dana pinjaman sudah sesuai dan memenuhi syarat jika tidak memenuhi syarat akan dikembalikan lagi kepada nasabah untuk dilengkapi, persyaratan dalam pengajuan dana pinjaman yang terdiri dari BPKB asli, STNK asli, KTP asli, membawa unit kendaraan sesuai BPKB yang dijaminkan dan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Unit Kredit KPRI Raung Besuki selanjutnya fungsi verivikator mengecek persyaratan yang diajukan oleh nasabah. Fungsi operator menginput data yang telah diverifikasi oleh verivikator. Fungsi Validator bertugas menyetujui atau memvalidasi persyaratan berkas pengajuan. Fungsi operator menerima data dari validator dan menginput data sesuai dengan berkas yang diterima operator juga menerbitkan bukti cek fisik kendaraan dan bukti kas keluar dan meminta otorisasi kepada pimpinan yang selanjutnya tugas validator yang melakukan cek fisik kendaraan dengan melihat tahun kendaraan, nomor rangka dan nomor mesin serta diperkirakan dengan harga pasaran unit kendaraan tersebut untuk memperkirakan jumlah pencairan dana dan diberikan kepada kasir untuk melakukan pencairan dana.

3. Informasi dan Komunikasi

Unit Kredit KPRI Raung Besuki dalam pelaksanaan informasi dan komunikasi berjalan sesuai perencanaan dari manejemen perusahaan. pelaksanaan informasi dan komunikasi Unit Kredit KPRI Raung Besuki mulai dari identifikasi, verifikasi, pemasukan dan pengarsipan data, serta persetujuan pencairan dana berdasarkan bagian yang terkait yaitu verifikator, validator, serta operator. Informasi dan komunikasi pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki juga di bahas pada saat rapat anggota dihadiri oleh penanggung jawab Unit Kredit diadakan dikantor pusat rutin setiap akhir bulan yang membahas tentang perkembangan hasil usaha, tunjangan dll. Sehingga proses komunikasi pada perusahaan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dari pihak manejemen guna tercapainya kinerja perusahaan lebih baik di masa yang akan datang dari segi sistem informasi dan komunikasinya.

4. Aktivitas Pengendalian

Kebijakan Pengendalian dan prosedur harus ditetapkan dan dilaksanakan. Hal ini akan memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diidentifikasi manajemen untuk menghadapi resiko yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan dilaksanakan secara efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Unit Kredit KPRI Raung Besuki adalah mengenai otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai pada Unit Kredit KPRI Raung otorisasi yang mutlak dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Otorisasi tersebut dapat berupa penandatanganan, pemberian paraf, dan pemberian kode otorisasi atas dokumen. Pemisahan tugas pada Unit Kredit KPRI

Raung telah dibentuk dan terlihat dalam struktur organisasi yang dibentuk. Pemisahan tugas tersebut membatasi dan membedakan tanggung jawab antara otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan. Setiap bagian telah memiliki tanggung jawabnya masing-masing.

5. Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan merupakan proses penilaian terhadap pengendalian internal. Kegiatan pemantauan tersebut bukan hanya mengawasi saja, namun harus mengukur dan mengarah pada analisis dan langkah tindak lanjut yang tepat. Pemantauan pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki proses monitoring dilakukan pada kinerja dan bagian penagihan. Pemantauan kinerja dilakukan dengan pertemuan setiap akhir bulan seluruh penanggung jawab Unit Kredit beserta pengurus kantor pusat mengadakan rapat dikantor pusat melakukan evaluasi kinerja terhadap sisa hasil usaha, tunjangan dll. Yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemantauan penagihan yang ada di Unit Kredit KPRI Raung Besuki adalah penanggung jawab. Pemantauan Penagihan tidak dilaksanakan secara berkala dan konsisten, kalaupun melakukan pemantauan penagihan tidak terjadwal dengan baik dan jarang sekali dilakukan yang berdampak pada peningkatan kredit macet sehingga pengendalian internal tidak efektif.

**4.3.2 Evaluasi perbandingan Unsur-Unsur Pengendalian Internal Pada Perusahaan dengan Teori**

1. Lingkungan Pengendalian

Pada Unit KPRI Raung Besuki telah menerapkan pengendalian internal sesuai dengan teori, hal ini terlihat pada struktur organisasi yang telah di buat dengan baik serta adanya pemisahan tugas dan wewenang yang jelas. Pemisahan tugas yang jelas tersebut membuat kinerja pada perusahaan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan oleh manejemen perusahaan.

2. Penaksiran Resiko

Pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki penerapan penaksiran resiko meliputi identifikasi, verifikasi, dan analisis. Secara umum pada saat penaksiran resiko yang diterapkan perusahaan tidak sepenuhnya sesuai dengan teori. akan tetapi, ketidaksesuaian tersebut nampak pada pertimbangan pada saat melakukan validasi yang terlalu cepat, sehingga pertimbangan dalam pencairan dana terlalu cepat yang memungkinkan terjadinya kesalahan serta banyaknya peminat permohonan kredit. Akibat dari terlalu cepatnya keputusan dalam melakukan validasi tersebut yaitu kurang efektifnya pengecekan kembali atas calon nasabah yang nantinya akan merugikan perusahaan dari penarikan pengembalian kredit yang telah dipinjam dari nasabah. Oleh karena itu perlu diadakan evaluasi kembali terhadap pengendalian internal perusahaan

dari segi penaksiran resiko yang diambil oleh perusahaan.

3. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan teori, yaitu dimana semua informasi yang mencakup pencatatan, sampai dengan pelaporan telah dilaporkan dengan baik. Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh bagian sub devisi masing-masing yaitu bagian verifikator, validator, operator, sampai dengan bagian kasir pada perusahaan yang menangani operasional perusahaan dan diawasi langsung oleh pimpinan penanggungjawab.

4. Aktivitas Pengendalian

Pada Unit KPRI Raung Besuki aktivitas pengendalian telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai teori, dimana adanya pemisahan tugas dan wewenang antara setiap sub bagian telah jelas, penggunaan sistem informasi dan komunikasi, jaringan prosedur dan proses pengolahan fisik sistem informasi yang membentuk telah sesuai dengan teori dan telah dijalankan dengan baik.

5. Pemantauan

Pada Unit Kredit KPRI Besuki aktivitas pemantauan masih menuai kendala, yaitu kurangnya pengawasan pemantauan sehingga bagian penarikan dana kredit dalam menjalankan tugasnya sering mengalami keterlambatan dalam melakukan penagihan terhadap nasabah. Selain itu, juga terlalu banyaknya jumlah nasabah yang mengakibatkan sulitnya dalam proses penagihan bila ditargetkan oleh pihak menejemen.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan hasil analisis serta lampiran, maka dapat diambil kesimpulan hasil penelitian yaitu:

1. Pengendalian Internal pada Unit kredit Agunan KPRI Raung Besuki tidak memiliki bagian yang khusus untuk pengendalian internal sebagaimana yang ada pada perusahaan besar.
2. Penilaian terhadap lima unsur pengendalian internal di Unit Kredit KPRI Raung meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Aktivitas Pengendalian

Pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki telah menerapkan Pengendalian Internal dan sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan teori.

b. Penaksiran resiko

Pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki penerapan penaksiran resiko meliputi identifikasi, verifikasi dan analisis tidak sepenuhnya sesuai dengan teori, akan tetapi ketidaksesuaian tersebut nampak pada pertimbangan pada saat melakukan validasi pencairan dana yang terlalu cepat, akibatnya kurang efektif dalam melakukan validasi tersebut.

c. Pemantauan (*Monitoring*)

Pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki aktivitas pemantauan masih menuai kendala yaitu kurangnya pengawasan pemantauan sehingga bagian penarikan dana kredit dalam menjalankan tugasnya sering mengalami keterlambatan dalam melakukan penagihan terhadap nasabah.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan peneliti pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki ditemukan beberapa kendala dalam memperoleh informasi yang peneliti butuhkan. Berikut keterbatasan penelitian pada pencarian informasi pengendalian internal pemberian kredit pada Unit Kredit KPRI Raung:

a. Dari segi penelitian hanya fokus pada satu Unit Kredit saja yaitu pada Unit Kredit KPRI Raung Besuki sehingga tidak bisa digeneralisir pada unit-unit yang lain yang ada dalam KPRI Raung.

b. Jenis penelitian merupakan studi kasus sehingga tidak dapat digeneralisir pada koperasi lain.

## 5.3 Saran

Adapun saran penelitian yang dibuat oleh peneliti guna lebih memperbaiki kembali kekurangan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, hendaknya untuk verifikasi dan validasi terkait pemberian kredit pada nasabah harus lebih diidentifikasi kembali agar meminimalisir adanya permasalahan kredit macet terutama dari cek fisik kendaraan, serta latar belakang calon nasabah. Sedangkan dari pemantauan karyawan bagian penagihan hendaknya lebih untuk ditingkatkan dari segi pengawasan dan kinerja karyawan tersebut guna meningkatkan pengendalian internal yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya lebih memperluas penelitian bukan dari pengendalian internal pada kredit koperasi, melainkan perusahaan baik perusahaan jasa ataupun dagang. Sedangkan untuk lampiran dan referensi hendaknya lebih ditambah dari peneliti sebelumnya guna memperlengkap dan memperjelas serta memperbaiki kekurangan dari peneliti terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA


Anoraga, Pandji, dan Ninik Widiyanti. 2012. ***Dinamika Koperasi***. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arifin dan Tamba Halomoan. 2001. ***Koperasi: Teori dan Praktik***. Jakarta: Erlangga.

Boynton, Johnson, Kell. 2003. ***Modern Auditing***. Edisi Ketujuh. Jilid Satu. Jakarta: Erlangga.

Baridwan, Zaki. 2012. ***Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode***. Edisi kelima. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Danang, Sunyoto. 2013. ***Metodologi Penelitian Akuntansi***. Bandung: PT. Rafika Aditama Anggota Ikapi.

G. Kartasapoetra, etc. 2009. ***Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945***. Jakarta: Rineka Cipta.

Hasibuan, Malayu. 2004. ***Dasar-Dasar Perbankan***. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. ***Standart Akuntansi Keuangan***. Jakarta: Salemba Empat.

I Cenik Ardana, Hendro Lukman. 2016. ***Sistem Informasi Akuntansi. Edisi pertama***. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kasmir. 2012. ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya***. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lilis Puspitawati, Sri Dewi Handayani. 2011. ***Sistem Informasi Akuntansi***. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marshall B. Romney & Paul John Steinbart. 2009. ***Accounting Information System (Pearson Education, New Jersey)***. Jakarta: Salemba Empat.

Marshall B. Romney & Paul John Steinbart. 2015. ***Accounting Information System (Pearson Education, New Jersey)***. Jakarta: Salemba Empat.

Nur Indriantoro dan Bambang Sopomo. 2016. ***Metodologi Penelitian Bisnis***. Yogyakarta: BPFE UGM.

Penerbit Fakultas Ekonomi Unmuh Jember. 2015. ***Pedoman Penulisan Skripsi***. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.

Suyatno, Thomas. 2003. ***Dasar-Dasar Perkreditan***. Edisi keriga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Theodorus M. Tuanakotta. 2013. ***International Standards on Auditing***. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No. 12 tahun 1976. ***Tentang Modal Koperasi***.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. ***Tentang Perkoperasian***.